Arah Kebijakan Daerah tahun 2010

Pada Tahun 2010 ini kebijakan pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Jawa Barat sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkabn pendapatan daerah adalah :

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, OPD penghasil. Kabupaten/kota, POLRI.
4. Meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
6. Menigkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya penigkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan dana perimbangan;